

PERGOLAKAN KAUM BANGSAWAN TERHADAP KESULTANAN BUTON PADA ABAD XIX

Oleh
Hasaruddin

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembagian kelompok bangsawan di wilayah kesultanan Buton. Kelompok bangsawan yang dibagi dalam tiga *kamboru-mboru* pada akhirnya menimbulkan persoalan kekecewaan pada kelompok bangsawan tertentu. Perasaan kekecewaan tersebut diimlemtasikan dalam sebuah gerakan yang ditujukan pada pusat pemerintahan kesultanan Buton di abad XIX.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang terdiri dari empat tahapan yang terdiri atas : Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak sejarah masa lampau. Heuristik merupakan tahap awal dari historiografi diawali dengan kegiatan penjajakan, perincian serta pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Tahap kedua, kritik yang meyelidiki apakah jejak sejati baik bentuk maupun. Tahap ketiga, interpretasi, yaitu setelah melakukan kritik sumber dihadapkan informasi atau data-data mengenai subyek penulis sejarah yang berhubungan dengan obyek yang teliti. Data-data tersebut adalah fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya, tahap keempat historiografi yaitu mengajukan sintesa yang diperoleh dalam kisah-kisah sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat adanya pembagian kekuasaan menimbulkan adanya perpecahan atau perlawanan atau pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bangsawan lain. Khusus pada abad XIX ada dua gerakan yang dilakukan oleh kelompok bangsawan yang oposisi yaitu gerakan yang berlangsung di wilayah Kamaru dan di Loji. Di Kamaru dipimpin oleh La Manepa dan dapat melakukan pemberontakan tetapi belum sempat masuk dalam wilayah pusat pemerintahan pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh utusan sultan Muh. Isa yaitu Kapitalao Kamaru. Gerakan yang dilakukan di Loji dipimpin oleh La Ode Japere Yarona Kaedupa di Loji. Gerakan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan tingkat diplomasi.

ABSTRACT

This research was motivated by the division of aristocratic groups in the Buton Sultanate. The aristocratic group which was divided into three *kamboru-mboru* eventually caused disappointment to certain aristocratic groups. This feeling of disillusionment was implied in a movement aimed at the seat of government of the Sultanate of Buton in the nineteenth century.

In this study, using a method consisting of four stages consisting of: Heuristics, namely the activity of collecting traces of the past history. Heuristics is the initial stage of historiography beginning with the exploration, detailing and collection of sources related to a thorough problem. The second stage, criticism which investigates whether true traces of both form and. The third stage, interpretation, which is after criticizing the source, is confronted with information or data regarding the subject of the history writer who is related to the object that is researched. These data are historical facts that can be verified. The fourth stage of historiography is to propose a synthesis obtained in historical stories.

The results of the research show that the result of the division of power has resulted in divisions or resistance or movements carried out by other groups of aristocrats. Especially in the XIX century, there were two movements carried out by opposition groups of the nobility, namely the movement which took place in the Kamaru region and in Loji. In Kamaru led by La Manepa and able to carry out a rebellion but had not yet entered the central government territory the rebellion could be extinguished by the sultan's envoy Muh. Isa, namely Kapitalao Kamaru. The movement carried out at Loji was led by La Ode Japere Yarona Kaedupa yi Loji. The movement that is carried out can be completed with a diplomacy level.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya kerajaan Buton diawali dengan kehadiran Wakaakaa, yang kemudian dinobatkan menjadi raja Buton pertama. Wakaakaa adalah seorang wanita yang kemudian kawin dengan salah seorang yang diidentifikasi berasal dari kerajaan Majapahit yang bernama Sibatara. Dari hasil perkawinan tersebut, mereka memiliki tujuh orang keturunan dan tidak satupun dari keturunannya seorang laki-laki tetapi ketujuhannya adalah perempuan dan salah seorang dari perempuan tersebut bernama Bulawambona yang menjadi pengganti ibunya sebagai raja Buton. Pada masa pemerintahan Bataraguru (Bancapatola) digunakannya gelar kebangsawanan dengan istilah *La Ode*. Zahari (1977: 36) menjelaskan bahwa dalam perkataan adat pada pelantikan Bataraguru menteri Peropa berkata *ise, jua, talu, apa, lima, ana, pitu, walu, sio, sapuluaka yingkoo LaOde*.

Pada perkembangannya bahwa kelompok bangsawan ini kemudian dibagi menjadi tiga aliran bangsawan pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1596-1631). Aliran bangsawan tersebut adalah aliran bangsawan *tanayilandu* yang merupakan turunan dari dayanu Ikhsanuddin. Aliran bangsawan *tapi-tapi* yang merupakan turunan dari La Singga, dan aliran bangsawan dari *kumbewaha* yang merupakan turunan dari La Bula. Pembentukan aliran tersebut dilakukan Dayanu Ikhsanuddin secara politis agar dapat melanggengkan turunannya sebagai penerus sultan Buton berikutnya. Oleh karena itu, Dayanu Ikhsanuddin meminta kekuatan dari VOC sebagai sekutu agar memberikan legitimasi kekuatan tentang aliran bangsawan yang dibuatnya. Pada perjanjian kedua antara VOC dan Buton dituangkan dalam sebuah perjanjian bahwa kelak yang menjadi sultan Buton yaitu antara Syamsuddin dan Kamaruddin yang keduanya merupakan turunan dari dayanu Ikhsanuddin (lihat Ligtoet, 1878: 33). Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa pada masa

pemerintahannya dianggap puncak kejayaan kerajaan Buton tahap kedua sesudah Murhum menjadi raja Buton yang pertama dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Meskipun pada masa tersebut tidak timbul gejolak politik dari aliran bangsawan lain yang dibuat oleh Dayanu Ikhsanuddin tetapi tanda-tanda akan bentuk kecemburuan dari yang lain telah ada. Hal ini karena Dayanu Ikhsanuddin lebih mementingkan kepentingan tuunannya secara langsung disbanding dengan keentingan kerajaan/kesultanan. Sementara itu, Dayanu Ikhsanuddin, La Singga, dan La Bula masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat (ketiganya bersepupu). Di samping itu, bahwa erajaan Buton dibagun dari turunan yang satu dan hendaknya tidak ada perbedaan pembagian dalam haal aliran bangsawan demi kepentingan turunana masing-masing orang perorang. Oleh karena itu maka selalu ada gejoak dari aliran bangsawan lainnya. Hal tersebut berlanjut meskipun kerajaan/kesultanan Buton mencapai masa puncak yang ketiga. Yang dimaksud masa puncak tersebut adalah masa puncak peradaban Islam serta pengembangan ajarannya di wilayah kerajaan/kesultanan Buton.

Pada abad XIX kerajaan/kesultanan Buton mencapai masa kejayaannya khususnya pada masa pemerintahan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824 – 1851). Puncak kejayaan tersebut tidaklah dibarengi dengan keamanan di wilayah pemerintahan kerajaan/kesultanan. Pihak pusat pemerintahan khususnya sultan hanya fokus pada pengembangan agama khususnya agama Islam yang telah ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan/kesultanan. Di samping itu ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas terhadap kepemimpinan dari Muhammad Idrus Kaimuddin sebagai sultan di Buton. Pokok perhatian tersebut dapat dilihat dari sejumlah karya tulis (sastera) sultan Muhammad Idrus Kaimuddin dalam hal pengembangan ajaran agama Islam (Hasaruddin & Andi Tenri, 2012: 99-100). Dimungkinkan bahwa dengan adanya penguatan Islam maka akan menguatkan pula keutuhan dan stabilitas serta keamanan dalam wilayah kekuasaan kerajaan/kesultanan Buton. Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan realita dilapangan. Gejolak dalam lingkngan masyarakat selalu ada khususnya pada abad XIX. Aliran bangsawan lain merasa diperlakukan tidak adil dalam penempatan jabatan di wilayah kerajaan/kesultanan Buton. Dari persoalan tersebut, aliran bangsawan dari kelompok yang lainnya berupaya keluar dari pusat pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton untuk membentuk kekuatan dan melakukan mobilisasi dalam lingkungan masyarakat untuk melakukan pergolakan terhadap pusat pemerintahan kerajaan/kesultanan (Wolio). Hal ini yang membuat ketertarikan penulis untuk menganalisis pergolakan kaum bangsawan pada abad XIX di wilayah kerjaan/kesultanan Buton.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang kredibel maka dalam penelitian ini digunakan metode sejarah yaitu menelaah dan membahas suatu masalah berdasarkan peristiwa sejarah secara kronologis dan metode komparatif dengan mengutamakan dimensi waktu. Peristiwa akan disusun berdasarkan urutan waktu peristiwa yang akan dibuat secara sistematis. Untuk mendapatkan hasil tersebut maka dalam penelitian yang akan dilakukan digunakan pendekatan metode sejarah yang dimaksud berpedoman pada Pranoto (2010: 29-56) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Heuristik yaitu kegiatan menghimpun atau mencari data awal tentang kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Langkah ini adalah merupakan kegiatan awal dalam upaya peninjauan sumber awal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan khususnya di wilayah pusat pemerintahan kerajaan Buton yaitu Wolio yang sekarang disebut keraton.
- b. Kritik yaitu menganalisa jejak yang ditemukan di lapangan apakah sumber itu dapat dipertanggungjawabkan dari segi bentuk dan isi. Setelah data yang dikumpulkan dianggap cukup, maka pada tahap selanjutnya adalah diadakan kritik, untuk menguji dan menyeleksi kebenaran serta otentitas suatu sumber guna mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- c. Interpretasi yaitu melakukan penafsiran data yang di dapatkan di lapang.
- d. Historiografi yaitu mengajukan sintesa yang diperoleh dalam kisah sejarah.

B. Sumber Data

Sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini diklasifikasi antara lain sumber primer dan sekunder. Data primer adalah informasi pokok yang diperlakukan dalam penelitian ini dengan bersumber pada beberapa catatan naskah yang ada di Buton yang khusus menceritakan/membahas tentang hubungan antara Buton dan Ternate. Sumber data sekunder merupakan data banding atau tambaha terhadap penelitian yang dilakukan. Sumber sekunder ini memungkinkan untuk memberikan informasi awal dalam melakukan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Sumber sekunder tersebut berupa hasil penelitian, majalah, buku-buku yang telah terbit.

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Adalah suatu metode untuk memperoleh suatu sumber secara langsung dilapangan dengan berorientasi pada hasil-hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data yang akurat maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maupun perorangan yang ada dalam wilayah Kota Baubau. Lembaga-lembaga tersebut anantara lain lain. Perpustakaan Unidayan. Perpustakaan Pemerintah Kabuapten Buton yang ada di Baubau, dan Mulku Zahari yang merupakan tempat penghimpun koleksi arsip kesultanan Buton.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data atau informasi yang diperoleh di kegiatan penelitian lapangan, yang dengan melakukan penyaringan dan seleksi data bertujuan untuk mengambil dan menguji apakah data tersebut bersifat formal, asli atau palsu dengan melalui kritik eksteren dan kritik iteren terhadap sumber yang diperoleh. Kritik Eksteren (luar), yang meneliti apakah dokumen satu autentik, yaitu menyatakan identitas, jadi bukan suatu tiruan/palsu, semuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan sebagainya (Kartodirdjo, 1992:16) Kritik Interen (Dalam), yang mewakili hubungan fakta sejarah dengan yang termuat dalam sumber yang bersangkutan juga dikaitkan dengan data itu sendiri. Kritik eksteren dilakukan menjawab pertanyaan apakah sumber itu palsu atau tidak. Penggunaan kritik ini sepenuhnya diterapkan karena penelitian yang diajukan dilakukan melalui studi kepustakaan. Kritik interen bertugas untuk mengetahui kesusahan suatu sumber yang dapat dilakukan dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dalam masalah yang sama dengan bahan rujukan yang berbeda. Dengan kata lain sumber yang satu dengan sumber yang lain tidak saling mengutip.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Awal Munculnya Kerajaan Buton

Dalam upaya mengkaji tentang pergolakan kaum bangsawan di wilayah kesultanan Buton terlebih dahulu menilik sepintas tentang perjalanan sejarah terbentuknya kerajaan Buton. Hal ini dianggap sangat penting agar dapat menentukan siapa para pendiri dari kerajaan tersebut. Dengan adanya gambaran tersebut akan memberi pula pemahaman kepada kita mengapa kelompok bangsawan yang pada akhirnya melakukan pergolakan terhadap

wilayah pusat pemerintahan atau dengan kata lain bahwa sebageian dari kelompok bangsawan merasa tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan yang ada khususnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kesultanan.

Berdasarkan cerita tradisi (legenda) masyarakat setempat, asal usul penamaan *wolio* muncul dari suatu kisah kedatangan *mia patamiana* (empat orang) ke Pulau Buton. Keempat orang dimaksud adalah Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, dan Sijawangkti. Mereka berasal dari Semenanjung Malaka. Mereka tiba di Buton sekitar akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. (Zahari, 1977: 47; Zaenu, 1985: 26; Yunus, 1995: 19; Zuhdi, 1996: 10). Kisah *mia patamiana* menceritakan bahwa sesampainya empat orang tersebut di Pulau Buton, mereka segera “menebas” hutan belukar untuk tempat tinggal. Dalam bahasa Wolio penebasan hutan belukar disebut dengan kata *welia*. Dari kata *welia* itulah kemudian muncul penamaan Wolio. Waktu perubahan nama dari Butun ke Buton dan Welia ke Wolio tidak diketahui secara pasti. Adapun istilah Buton dan Wolio masih tetap digunakan sampai sekarang. Yang pertama menunjukkan nama sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dan nama sebuah pulau di bagian tenggara Pulau Sulawesi, sedangkan yang kedua digunakan untuk menunjukan nama bekas Kesultanan Buton dan penghuni bekas pusat kesultanan tersebut (*miana wolio*) artinya orang Wolio.

Berkaitan dengan pohon butun, dalam tradisi masyarakat setempat, terdapat upacara yang disebut dengan *kaepe*. Pada upacara tersebut masyarakat setempat menggunakan daun butun sebagai pengganti piring dengan anggapan untuk mendapatkan berkah keselamatan. Namun, alasan pemakaian daun pohon butun sebagai simbol keselamatan sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Pohon butun banyak tumbuh di daerah pesisir pantai bagian selatan Pulau Buton, yaitu suatu tempat yang sejak dahulu banyak disinggahi kapal-kapal layar (Yunus, 1995: 11; Zuhdi, 1994: 1). Dalam dunia ilmu tumbuhan pohon “butun” dikenal dengan nama *borringtonia asiatica* (Anceaux, 1987: 25; Heyne, 1987: 1480; Poerwadarminta, 2001: 161).

Penduduk yang mendiami pulau itu membuat perkampungan di sekitar pesisir pantai yang disebut dengan kampung Kalampa. Dalam waktu yang relatif singkat kampung tersebut berkembang menjadi sebuah kampung yang besar dan ramai. Posisi Kalampa yang strategis berada di tepi pantai menjadi sasaran bajak laut yang diduga berasal dari daerah Tobelo, Maluku Utara (Zahari, 1977: 49; Zaenu, 1985: 26; Zuhdi, 1996: 13).

Untuk menghindari gangguan dari bajak laut yang kian waktu kian meningkat, mereka meninggalkan daerah Kalampa dan menuju timur yang jauhnya sekitar 5 km dari daerah yang didiami pertama. Di tempat yang baru itu, mereka kemudian membangun

perkampungan. Namun tempat baru itu masih ditumbuhi hutan belukar. Segeralah mereka membangun pemukiman dengan melakukan penebasan belukar. Kegiatan penebasan dalam bahasa Buton disebut dengan “welia”. Dari kata *welia* ini kemudian berubah menjadi Wolio yang letaknya menjadi pusat pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton (Zaenu, 1985: 27; Zuhdi, 1996: 14; 1999: 25). Dalam tradisi masyarakat setempat dinyatakan bahwa kata *wolio* berasal dari kata “waliullah”. Pendapat ini didasarkan pada suatu legenda yang menceritakan bahwa, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa sahabatnya yang bernama Abdul Syukur dan Abdul Gafur untuk mencari suatu negeri yang oleh nabi diberinya dengan nama *Butuni*, kelak dikemudian hari akan dihuni oleh para *wali Allah*. Pendapat ini menunjukkan pula adanya emosi sufistik masyarakat Buton sehingga penamaan negerinya dikaitkan dengan kata *wali Allah* yang lazim dipakai dalam dunia tassawuf (Yunus, 1995: 14). Lokasi terakhir tempat pemukiman kelompok pendatang, dikemudian hari menjadi kerajaan/kesultanan Buton.

Menurut cerita legenda setempat, raja pertama Kerajaan Buton adalah seorang perempuan yang bernama Wa Kaakaa. Berdasarkan legenda dalam masyarakat setempat Wa Kaakaa ditemukan dari dalam sebilah bambu di atas sebuah bukit yang disebut dengan bukit *lelemangura*, yaitu suatu kawasan perbukitan kecil yang letaknya di dalam benteng keraton Buton. Para pemuka masyarakat saat itu mengangkat Wa Kaakaa sebagai raja dan diberi julukan *mobetena yitombula* (gadis yang lahir dari dalam bambu). Selanjutnya, ada lima orang raja lagi yang memerintah Kerajaan Buton, yaitu Bulawambona, Bataraguru, Tua Rade, Raja Mulae, dan Lakilaponto. Pada masa pemerintahan kerajaan Buton pertama sampai keenam, yaitu abad ke-14 sampai abad ke-16, masyarakat Buton menganut kepercayaan agama Hindu (Zuhdi, 1996:11). Berkenaan dengan hal tersebut, Zahari (1977:52--53) menjelaskan bahwa peninggalan Brahma atau Hindu di Buton dapat ditelusuri melalui (1) adanya kepercayaan bahwa nyawa atau roh manusia tidak mati tetapi berpindah kepada yang lain, (2) percaya kepada berhala, berupa penyembahan kepada dewa-dewa dalam bentuk patung-patung batu. Di samping itu, terdapat pula kepercayaan kepada berhala menurut nama dan tata cara yang dilakukannya, antara lain (a) *pakande wurake*, yaitu memberi makan kepada setan yang jahat dan (b) *syara wajo*, yaitu memberi makan kepada penguasa laut.

Pada masa pemerintahan Lakilaponto terjadi perubahan bentuk ketatanegaraan, yaitu dari bentuk “kerajaan” menjadi “kesultanan”, sebagai dampak diterimanya Islam sebagai “bintang pembimbing” pada tahun 948 H atau 1540 M (Yunus, 1995: 2). Sementara itu, Couvreur (2001: 221) menyebutkan bahwa pelantikan La Kilaponto sebagai sultan pertama di Buton berlangsung pada tanggal 1 Puasa (Ramadhan) 948 H atau 19 Desember 1541.

Dengan masuknya Islam, pada tahun 1610 Sultan Dayanu Ikhsanuddin Khalifatul Khamis, sebagai sultan Buton keempat menetapkan berlakunya “Undang-Undang Dasar Martabat Tujuh” sebagai dasar konstitusi Kesultanan Buton. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada saat Kesultanan Buton dipimpin oleh Sultan Dayanu Iksanuddin Khalifatul Khamis yang memerintah tahun 1597-1631 telah diberlakukan Undang-Undang secara tertulis yang didasari pada ajaran agama Islam. Undang-undang itu, dinamakan Undang-Undang Martabat Tujuh. Dalam proses pembuatan undang-undang ini Sultan Dayanu Ikhsanuddin Khalifatul Khamis didampingi seorang ulama berkebangsaan Arab yang bernama Syekh Syarif Muhammad (Zahari, 1977: Schoorl, 1985: 1; Yunus, 1996: 1; Saidi, 1999: 3). Dalam tradisi lisan diceritakan bahwa berlakunya Undang-Undang Martabat Tujuh diumumkan kepada masyarakat di Daoana Bawo di depan Mesjid Keraton Buton oleh Sapati La Singa pada tahun 1610 M (lihat, Ikram, 2001: 4; 2005: 8; Schoorl, 1985: 9; Yunus, 1995: 20; Zahari, 1977: 59; Zuhdi, 1996: 24). Hal-hal yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut antara lain: (1) masyarakat, termasuk anak kaum Bangsawan (Kaumu) terkadang telah melakukan suatu tindakan di luar koridor hukum yang ditetapkan pada masa itu; (2) tidak adanya suatu aturan/hukum positif yang tegas tentang penentuan wewenang penyelenggaraan negara yang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara yang merdeka dan berdaulat; (3) masyarakat Buton baru lepas dari krisis ekonomi yang pelik, yaitu musibah kelaparan yang disebabkan kemarau panjang di era pemerintahan sultan Buton ketiga, Sultan Qaim-ad-din (Saidi, 1999: 3)

Undang-Undang Martabat Tujuh menjadi sumber dari segala sumber hukum atau menjadi dasar sehingga produk undang-undang yang ada di bawahnya bersumber (disemangati) oleh Undang-Undang Martabat Tujuh. Sebagai Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Martabat Tujuh secara substansial memuat berbagai aturan hukum berdasarkan ide, pandangan, dan paham orang Buton tentang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Pada hakekatnya Martabat Tujuh merupakan sebuah istilah yang lahir dari mistisisme Islam, yang dikenal dengan tassawuf atau sufisme, yaitu suatu ajaran yang merupakan penjabaran ajaran *wahda al-wujud* (Yunus, 1996: 1-2). Ajaran-ajaran tersebut dipopulerkan di Buton oleh ulama-ulama berkebangsaan Arab seperti; Syekh Syarif Muhammad, Syekh Sayid Alwi, dan Syekh Sya'id Raba. Ulama-ulama tersebut datang di Buton sekitar awal abad ke-17 dan ke-18.

Ajaran Martabat Tujuh yang diterima di Buton ternyata tidak hanya dipahami dalam kerangka pemahaman tassawuf itu sendiri, melainkan diformulasi lebih lanjut dan disesuaikan dengan kepentingan kekuasaan pemerintah, yakni menjadi landasan dari sistem tata

kesultanan dan kedudukan sultan di Buton yang turut memberi legitimasi kekuasaan bagi para penguasa negeri, yaitu golongan Kaumu dan Walaka. Yang disebut pertama (Kaumu) adalah tingkatan pertama dalam stratifikasi masyarakat Buton dan akan menduduki jabatan sultan, sedangkan yang kedua (Walaka) adalah golongan masyarakat tingkat kedua yang menduduki jabatan *siolimbona* (majelis). Hal ini tampak dengan dijadikannya konsepsi ajaran tassawuf Martabat Tujuh sebagai alat legitimasi untuk memberikan wewenang bagi tiga garis keturunan bangsawan (Kaumu) Buton untuk berkuasa khususnya untuk menduduki empat jabatan strategis dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Buton melalui bentuk penyimbolan-penyimbolan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Kaumu Tanayilandu merupakan turunan Sultan Dayanu Ikhanuddin Khalifatul Khamis disimbolkan dengan martabat ahadiyyah.
2. Kaumu Tapitapi yang merupakan turunan Sapati La Singa disimbolkan dengan martabat wahdah.
3. Kaumu Kumbewaha yang merupakan turunan Kenepulu La Bula disimbolkan dengan martabat wahidiyyah.
4. Sultan disimbolkan dengan martabat alam arwah.
5. Sapati (perdana menteri) disimbolkan dengan martabat alam misal.
6. Kenepulu (jabatan semacam pimpinan lembaga hukum dan peradilan) disimbolkan dengan martabat alam ajsam.
7. Kapitalao (pimpinan angkatan perang) disimbolkan dengan martabat alam insan (Yunus, 1995: 4).

Dalam pelaksanaannya, selain mengatur kewenangan dan kedudukan golongan kaumu dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Buton, Undang-Undang Martabat Tujuh juga mengatur kewenangan dan kedudukan golongan Walaka yang menempati strata kedua dalam struktur pelapisan sosial dalam masyarakat Buton. Golongan Walaka inilah diberi wewenang dalam menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti, bonto (menteri), bonto siolimbona (dewan menteri yang beranggotakan sebanyak 9 menteri) yang berfungsi sebagai parlemen rakyat (lembaga legislatif). Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kesultanan Buton golongan Walaka juga diberi jabatan *bonto ogena* (pimpinan tertinggi dewan menteri).

B. Latar Belakang Munculnya Pergolakan Kaum Bangsawan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada masa pemerintahan sultan ke-4, Sultan dayanu Iksanuddin telah diterbitkan sebuah Undang-Undang yang disebut dengan Martabat Tujuh. Undang-Undang tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem pemerintahan di Kesultanan Buton. Di samping itu, pada masa pemerintahannya telah dibuat pula kesepakatan atau kerjasama dengan orang-orang Belanda. Kesepakatan tersebut dibuat pada 5 Januari 1613. Kesepakatan tersebut hanya membahas tentang persekutuan diantara keduanya terutama mengenai saling membantu dalam urusan politik dan keamanan. Dalam persoalan tersebut Dayanu Ikhsanuddin telah memikirkan secara matang karena Wilayah Buton secara politik dihadapkan pada dua kekuatan besar yaitu, kekuatan Gowa pada bagian barat dan Ternate pada bagian timur.

Masa pemerintahan Dayanu Ikhsanuddin-pun membuat pembagian tiga kelompok bangsawan atau disebut dengan *kaboru-mboru*. Pada masa pemerintahannya, tiga jabatan paling atas dijabat oleh saudara sepupu Dayanu Ikhsanudian yaitu La Bula dan La Singga. La Elangi dianggap sebagai pangkal dari *kaboru-mboru tanayilandu*, La Bula sebagai pangkal *kaboru-mboru Kumbewaha*, dan La Singga dianggap sebagai pangkal dari *kaboru-mboru Tapi-Tapi*. Ketiganya berasal dari kakek yang sama yaitu La Maido (Raja Batauga). Turunan La Maido diantaranya adalah La Kabaura dan La Siridatu. Dalam sislilah bangsawan Buton dijelaskan bahwa ... La Kabaura beristri dengan Banganila anak Murhum juga. Maka La Kabaura dan Wa Bunganila beranak dua orang laki-laki; pertama Lalaki Mmancuana i-Kumbewaha La Bula (namanya) kedua Sangia i-Tapi-Tapi La Singka (namanya)..... (Niampe & La Ode Syukur, 2009: 87). Sementara itu, La Siridatu yang salah satu anaknya adalah bernama La Elangi (Sultan Buton ke-4).

Tujuan dari pembagian tersebut adalah agar supaya Turunan dari La Elangi (Dayanu Ikhsanuddin) menjadi generasi penerus untuk menduduki jabatan sultan Buton berikutnya. Dalam upaya penguatan hal tersebut Dayanu Ikhsanuddin berepakat pula dengan pihak VOC tertanggal 29 Agustus 1613. Dalam perjanjian tersebut pada pasal 1 berbunyi “bila sultan wafat maka sebagai calon pengantinya yang pertama adalah Kamaruddin dan kedua Syamsuddin” (Ligtvoet, 1887: 33). Dari kedua nama tersebut maka yang ditetapkan menjadi sultan Buton adalah kamaruddin (La Balawo). Penguatan lainnya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang dasar Kerajaan Buton yang disebut dengan Martabat Tujuh. Jika daerah lainnya di nusantara Martabat tujuh hanya dijadikan sebagai salah satu pandangan hidup dalam penguatan Islam maka di Buon Martabat Tuju dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu maka tiga tingkatan symbol dalam martabat tujuh melambangkan tentang ada *kaboru-mburu talupalena*. Hal ini dilakukan dengan harapan

bahwa ketiga *kamboru-mboru* tersebut tetap eksis dalam lingkungan masyarakat Buton. Jika hal tersebut dapat bertahan dalam lingkungan masyarakat Buton maka Sultan Dayanu Ikhsanuddin berhasil menerapkan konsep tersebut dan turunannya setelah dia dapat terus menjadi generasi sultan Buton berikutnya. Di samping itu, penetapan ketiga *kamboru-mboru* tersebut diharapkan dapat meredam keteangan diantara kelompok bangsawan di Buton. Tentu bahwa semakin hari semakin bertambah pula jumlah kelompok bangsawan sebagai dampak dari hasil kawin mawin. Untuk menghasilkan bangsawan yang matang maka pemerintah melarang pula kelompok bangsawan untuk kawin dengan kelompok lainnya yang bukan bangsawan. Dengan demikian bahwa kelompok lainnya tidak ada garis keturunan atau semacam kekuatan secara garis keturunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian pula bahwa kelompok tersebut tidak berkembang dengan jumlah yang cukup besar tetapi berkembang dengan jumlah yang sangat terbatas.

Persoalan tersebut tentu memunculkan salah satu bentuk kecemburuan dari kelompok *kamboru-mboru* yang lainnya. Meskipun demikian pada masa pemerintahannya (Ia Elangi) belum sangat nampak tentang adanya bentuk-bentuk kecemburuan tersebut tetapi bahwa sudah ada tanda-tanda tentang adanya pergesekan dari kelompok *kamboru-mboru* tersebut. Di samping itu perbedaan pandangan ketiga *kamboru-mboru* tersebut juga dipicu oleh adanya perbedaan pandangan tentang pengetahuan keislaman. Zuhdi (2010: 198) menjelaskan pertikaian dan perkelahian secara fisik antara kelompok-kelompok tersebut di atas, didasari oleh perbedaan paham tasawuf. Sejalan dengan pandangan tersebut Rudyansjah (2009: 208) menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang ditanggapi manusia sebagai sebagai “Yang Maha Kuasa” yang memiliki kekuasaan secara mutlak dan sempurna dalam diri-Nya sendiri. Sedangkan manusia sebagai makhluk yang fana tidak begitu sempurna sifatnya, karena itu manusia membutuhkan sesuatu yang lain untuk merealisasikan dirinya. Dan kembali dalam konteks Kesultanan Wolio, maka rakyat yang berada di dalam kesultanan ini menyerahkan diri sepenuhnya dan tunduk kepada sultan bukan karena sultan itu sendiri, melainkan karena keyakinan akan adanya “Yang Maha Kuasa” di dalam diri sang sultan.

Kata “di atas” yang diungkapkan tersebut adalah merujuk pada ada ketiga *kamboru-mboru*. Untuk menghindari gejolak tersebut maka kemudian mengangkat La Buke sebagai sultan Buton yang merupakan turunan dari kelompok bangsawan *Kumbewaha*. La Buke merupakan turunan langsung dari La Bula. Gejolak tersebut masih dapat teredam karena pengganti La Buke adalah Saparagau yang merupakan turunan dari Raja Mulae. Setelah Saparagau secara berturut-turut sultan Buton dipimpin oleh kelompok bangsawan dari *Tanayilandu* yaitu La Cila (Mardan Ali), Ia Awu (malik Sirullah), La Simbata (Adilil

Rakhiya), La Tangkaraja (Kaimuddin), La Tumpamana (Zainuddin), La Umati (Liyauddin Ismail). Jika kemudian sultan dipegang oleh kelompok lainnya seperti *Kumbewaha* akan menimbulkan pula gejolak yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan pandangan politik yang telah dibuat pada masa pemerintahan La Elangi bahwa sultan-sultan Buton berikutnya berasal dari kelompok *Tanayilandu* sementara dua kelompok lainnya diharapkan menduduki jabatan sapati diperuntukan kelompok *kumbewaha* dan kenepulu untuk kelompok *Tapi-Tapi*.

Pada abad XIX gejolak tersebut semakin konkrit karena yang menjabat atau duduk sebagai sultan umumnya dari kelompok bangsawan *Kumbewaha*. Sejak sultan Buton yang ke-27-31 dijabat oleh kelompok bangsawan dari *Kumbewaha* yang secara berurut-turut : La Badaru, La Deni, Muh. Idrus, Muh. Isa, dan Sultan Salihi. Meskipun demikian gerakan tersebut dapat teratasi khususnya pada abad XIX.

C. Jalannya pergolakan yang Dilakukan Oleh Kelompok Bangsawan

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa sejak adanya pembagian kelompok bangsawan di wilayah Buton mulailah muncul adanya gejolak diantara kelompok bangsawan yang didasari adanya ketidakpuasan terhadap kelompok lain yang memerintah. Di samping itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kesultanan terkadang tidak sepaham dengan orang-orang bangsawan lainnya dan menyebabkan orang-orang tersebut meninggalkan pusat pemerintahan dan masuk ke daerah-daerah pedalaman yang masih wilayah kesultanan Buton. Di wilayah-wilayah tersebut mereka mempengaruhi masyarakat. Masyarakat tentu sebagian mengikuti mereka karena pengetahuan tentang Islamnya dianggap baik. Tentu ini dapat dimengerti karena orang-orang Buton yang memiliki kekuatan mistik yang dimasukkan dalam konsep Islam dianggap seorang yang hebat. Terlebih bahwa pusat perkembangan Islam Buton pada masa itu berada pada pusat pemerintahan kesultanan.

Pergolakan kaum bangsawan Buton telah ada sejak abad XVII yang diwarnai adanya ketidakpuasan oleh kelompok bangsawan lainnya. Sejalan dengan pandangan tersebut Yunus (1995: 46) menjelaskan bahwa Buton senantiasa menghadapi serangan bajak laut yang senantiasa menyerang wilayahnya yang sangat terpencil. Di samping itu, ia juga menghadapi musuh-musuh dalam negerinya, baik yang datang dari kalangan bangsawan yang oposisi, maupun dari daerah yang ingin memisahkan diri dari penguasa pusat. Suasana seperti ini mewarnai esultanan Buton pada abad ke-19.

Pandangan Yunus tersebut member gambaran bahwa pada abd XIX gejolak politik dalam upaya merongrong wibawa pemerintah pusat masih ada. Salah satu gerakan yang muncul adalah gerakan yang dilakukan oleh La Ode Manepa. Ia telah lama berdiam diri di

Kamaru dan secara diam-diam membentuk satu kekuatan agar dapat merongrong kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kesultanan. Dalam tahun 1828 memulai kekacauan di wilayah Kamaru. Wilayah Kamaru diporak-porandakan oleh pasukan La Ode Manepa. Dengan kekuatannya yang sudah besar Masyarakat Kamaru tidak dapat membedakan kekuatan dari La Ode Manepa. Pada saat tersebut banyak dari rakyat Kamaru yang dianggap tidak mengikuti atau tidak mau ikut kelompok La Ode Manepa di Bunuh. Setelah memporak-porandakan Kamaru rencana La Ode Manepa dan pasukannya hendak turun atau ke wilayah pusat kesultanan Buton. Rencana dari La Ode Manepa cepat diketahui oleh Sultan Buton yang pada saat itu dijabat oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824 – 1851). Sebagai seorang pimpinan wilayah maka Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin berupaya mencari seseorang yang diharapkan memiliki kekuatan yang cukup dan mengetahui lingkungan tersebut. Dari hasil pemikirannya tersebut, Muhammad Idrus Kaimuddin mengutus Kapitalao Kamaru untuk dapat meredam kekuatan dan gerakan fisik yang dilakukan oleh La Ode Manepa. Dalam upaya meredam gerakan yang dilakukan oleh La Ode Manepa, Sultan Buton Muhammad Idrus Kaimuddin memberikan sejumlah prajurit terlatih untuk dapat membasminya. Dengan gerakan yang cepat Kapitalao Kamaru dengan cepat menuju wilayah Kamaru. Kedatangan Kapitalao Kamaru didengar pula oleh La Ode Manepa. Maka keduanya terjadilah kontak fisik dan perlawanan La Ode Manepa dapat dipatahkan. Meskipun demikian, Kapitalao Kamaru kehilangan beberapa anggota pasukan dan di antaranya adalah “ayah Ma Mandara:..

Peristiwa lain yang terjadi adalah pada masa pemerintahan Muh. Isa. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Baubau. Pergolakan tersebut dipimpin oleh La Ode Japere. Ia adalah seorang pembesar dari Kaedupa. Gerakan yang dilakukan oleh La Ode Japere dipicu oleh adanya kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Muh. Isa atas dirinya saat ditugaskan meredakan pertikaian kelompok bangsawan yang ada di Muna. Kekecewaan tersebut muncul karena sementara dalam menjalankan tugas di Muna, Muh. Isa mengutus lagi kelompok lain untuk memimpin pertikaian bangsawan di Muna. Kekecewaan tersebut akhirnya La Ode Japere menarik pasukannya dan mempersiapkan diri untuk menyerang pusat pemerintahan kesultanan. La Ode Japere melakukan konsolidasi dengan masyarakat umum yang berasal dari Muna, Kaedupa, dan dari pedalaman masyarakat Buton. Mendengar hal tersebut, Muh. Isa mempersiapkan pula pasukannya untuk menghadapi kekuatan dari La Ode Japere. Dalam tradisi lokal dijelaskan bahwa di kali Baubau telah bersiap perahu-perahu pasukan La Ode Japere khususnya yang berasal dari Muna dan Kaedupa. Lebih lanjut dijelaskan dalam tradisi lokal bahwa beberapa orang utusan Sultan Muh. Isa telah menemui La Ode Japere tetapi

orang-orang yang diutus tersebut tidak pernah sampai keatas rumah La Ode Japere yang bertempat di Loji. Utusan-utusan yang dikirim untuk menemui La Ode Japere dirumahnya selalu mengaami nasib sial yaitu perutusan tersebut mengalami muntah-muntah di depan rumah La Ode Japere. Dengan demikian setiap perutusan yang dikirim oleh Muh.Isa kembali ke keraton dan tidak dapat bertemu dengan La Ode Japere.Setelah beberapa orang utusan tidak dapat berhasil menemui La Ode Japere, Sultan Muh.Isa mengutus pembesar lainnya yang bernama “bontogena Ma Siridi” untuk menemui Yarona Kaedupa yi Loji La Ode Japere. “bontogena Ma Siridi” bergelar “binte ogena”(hewan yang tidak kelihatan). Dengan diiringi oleh beberapa menteri, mereka berupaya menemui La Ode Japere.Rombongan yang menemani bontogena Ma Siridi diisyaratkan untuk tidak naik langsung kerumah La Ode Japere tetapi menunggu di tanah.Ma Siridi langsung naik ke atas rumah dan langsung duduk di dekat La Ode Japere. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Ma Siridi membisik La Ode Japere dan tidak didengar oleh orang lain. Setelah Ma Siridi membisik La Ode Japere kemudian La Ode Japere berkata *tabeya siymbou yitu mancuana* atrinya “melainkan seperti yang demikian itu orang tua”.

Ma Siridi berhasil meredam amarah dari La Ode Japere dan ketegangan antara sultan Muh.Isa dengan La Ode Japere dapat diredam.Dari hasil percakapan antara Ma Siridi dan la Ode Japere, Ma Siridi menyampaikan kepada La Ode Japere untuk bersabar.Dalam percakapan tersebut terdapat kalimat Ma Siridi yaitu *sabhara yingkoo oanamupo mini naile yitu* (bersabarlah kamu, nanti anakmu saja kelak dikemudian hari).Dari hasil komunikasi tersebut La Ode Japere memiliki ambisi yang besar untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Sultan Muh.Isa. Tetapi dari hasil diplomasi yang dilakukan oleh salah seorang pembesar Buton dengan La Ode Japere, ia kemudian mengurungkan niatnya untuk mengadakan kudeta atau perlawanan terhadap pusat pemeerintahan kesultanan yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Isa.

Muhammad Isa secara fisik telah siap menghadapi gerakan yang dilakukan oleh La Ode Japere. Jika perang tersebut pecah maka akan menyebar dengan cepat dalam wilayah pusat pemerintahan kesultanan sebab La Ode Japere telah menyiapkan pasukan yang banyak untuk melakukan gempuran terhadap pusat kesultanan khususnya di Wolio. Sementara lokasi mereka sangat berdekatan yaitu La Ode japere berada di Loji (Nganganaumala) serta pasukannya telah berada di Sungai Baubau sedangkan pasukan Sultan Muh.Isa berada di wilayah benteng Keraton.

D. Dampak Munculnya Pergolakan

1. Pusat Pemerintahan Kesultanan

Pergolakan yang terjadi dalam wilayah pemerintahan kesultanan Buton khususnya yang dikumandangkan oleh kelompok bangsawan memberikan informasi bahwa kesultanan Buton pada masa silam setelah dibaginya kelompok bangsawan menjadi tiga kelompok telah muncul pertentangan-pertentangan kecil diantara mereka. Orang-orang yang merasa tidak puas tersebut kemudian diasingkan atau mengasingkan diri untuk tidak kembali lagi dalam wilayah pusat pemerintahan kesultanan. Kelompok bangsawan tersebut pada akhirnya mereka tidak dapat menduduki jabatan karena adanya aturan yang dikeluarkan oleh sultan dan syarat kerajaan bahwa bangsawan yang keluar meninggalkan pusat pemerintahan kesultanan yang keluar bukan karena utusan dari pusat pemerintahan untuk menjabat di daerah tertentu tetapi keluar oleh karena kehendak sendiri maka mereka tidak dapat menduduki lagi jabatan dalam pusat pemerintahan. Aturan yang ditetapkan tersebut mengurangi kesatuan dan persatuan dalam lingkungan masyarakat Buton khususnya yang pernah menetap dalam lingkungan keraton. Oleh karena itu banyak dari mereka banyak meninggalkan wilayah pusat pemerintahan dan melemahkan posisi kesultanan Buton sebagai sebuah kerajaan/kesultanan yang dianggap besar. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok bangsawan tersebut secara perlahan-lahan melemahkan posisi kesultanan Buton ditengah-tengah masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut dimanfaatkan pula oleh Belanda dan upaya memasukan Buon dalam konsep *Pax Neerlandica*. Meskipun Belanda tidak melakukan politik adu domba seperti daerah-daerah lain di nusantara tetapi kesultanan Buton yang sejak tahun 1613 telah diikat dengan perjanjian maka setelah adanya gejolak-gejolak tersebut dan sultan Buton terkadang meminta bantuan Belanda baik tenaga maupun senjata dan kelengkapan lainnya. Dari permintaan-permintaan tersebut tentu Belanda tidak memberikan secara gratis tetapi ada balasan dari pemberian tersebut. Adanya pua bangsa lain yang selalu masuk ke Buton, bangsa Belanda semakin waspada jika suatu ketika Buton kemudian berpihak kepada bangsa Eropa lainnya. Kedudukan atau posisi Buton sangat disadari oleh Belanda karena Buton sendiri berada pada jalur pelayaran yang menghubungkan antara barat dan timur dan jika bangsa Eropa lain yang menguasai Buton maka akan mengganggu perjalanan bangsa Belanda dari barat ke timur atau sebaliknya dalam upaya memawa rempah-rempah serta penghasilan-penghasilan lainnya yang siap untuk didagangkan atau yang akan dibawa ke Eropa.

Ohal-hal tersebut di atas, bangsa Belanda terus mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Buton agar tetap bersekutu dan tunduk kepada Belanda. Untuk kepentingan tersebut maka Belanda menganggap Buton sebagai anak dan Buton menganggap Belanda sebagai

bapak. Dengan demikian bahwa jika anak mendapat masalah maka kewajiban orang tua untuk membantu anaknya. Demikian sebaliknya bahwa jika orang tua memerlukan bantuan maka sudah sewajarnya anak memberikan bantuan kepada orang tuanya. Meskipun demikian bahwa tidak semua sultan yang memerintah di Buton menerapkan konsep tersebut. Hal itu pula yang selalu diperkuat oleh Belanda agar Buton pada akhirnya tidak melakukan pembangkangan atau perlawanan terhadap bangsa Belanda seperti beberapa sultan sebelumnya.

Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh beberapa pembesar yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang ketatanegaraan terpaksa meninggalkan Buton dan menuju ke arah timur yaitu Banda, Ambon, dan beberapa daerah Maluku. Hal tersebut memberikan pula dampak yang cukup besar karena pada akhirnya Buton sedikit terjadi krisis sumber daya manusia. Orang-orang yang mengharapkan akan adanya ketenangan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat meninggalkan pula wilayah Buton. Mereka kemudian masuk ke pelosok-pelosok atau pedalaman untuk agar dapat hidup dengan tentram dan damai. Beberapa penganjur tasawuf yang mengharapkan akan kehidupan damai akhirnya masuk ke daerah-daerah terpencil dan berusaha meninggalkan dunia yang penuh dengan berbagai dimensi pergerakan fisik maupun non fisik yang dapat mengganggu ketentraman jiwanya.

2. Masyarakat

Gesekan-gesekan yang dilakukan oleh kelompok bangsawan tentu sangat dirasakan pula oleh masyarakat dimana gerakan tersebut dilakukan. Gerakan yang dilakukan oleh La Manepa di wilayah Kamaru sangat dirasakan oleh masyarakat kebanyakan di wilayah tersebut. Gerakan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan membabi buta sehingga masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa turut merasakan pula akibat dari gerakan perlawanan yang dilakukan oleh La Manepa. Sebagai dampak dari itu, masyarakat di wilayah Kamaru banyak yang terbunuh dan rumahnya mengalami kerusakan akibat gerakan atau pemberontakan yang dilakukan oleh La Manepa. Tidak hanya sampai pada persoalan tersebut, La Manepa juga membawa hasil ternak sebagai masyarakat. Gerakan yang dilakukannya berdampak langsung kepada masyarakat dan sebagai akibat dari itu maka sebagai masyarakat Kamaru melakukan pengungsian ke daerah aman. Masyarakat sadar bahwa jika pasukan kesultanan Buton tiba di Kamaru maka akan terjadi perlawanan yang sengit dan akan semakin member dampak yang negatif terhadap masyarakat terutama dalam hal keamanan seluruh

anggota keluarganya. Dengan menghindar atau meninggalkan wilayah tersebut akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kamaru.

Demikian pula peristiwa persiapan kudeta yang dilakukan oleh La Ode Japere Yaron Kaedupa yi Loji, masyarakat merasakan tekanan psikologis yang cukup berat. Kedua pasukan telah mempersiapkan diri secara besar-besaran baik dari pihak La Ode Japere maupun pihak sultan Muhammad Isa. Masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut khususnya diantara Loji dan keraton tentu sangat was-was karena akan mengalami dampak langsung dari gerakan atau pertentangan tersebut. Dengan berdamainya kedua kelompok tersebut terutama pihak La Ode Japere menerima saran maka masyarakat merasa aman karena tidak terjadi perlawanan secara fisik yang pada akhirnya turut dirasakan oleh masyarakat yang ada disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R.M, 1965. *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. Jakarta : Bharata.
- Abdulsyani. 1992. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Adrian. Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta Tiara Wacana
- Asminto. 1987. *Sejarah Kebudayaan Indoensia*. Jakarta : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dikterot Jenderal Pendidikan Tinggi.
- B. Burhanuddin, dkk 1977 “ *Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara*” Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. Kendari.
- Depdkbut. 2005. *Komaus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Gazalba.Sidi. 1981. *Pengatar sejarah sebagai Ilmu*: Jakrta Bhatara

- Gottschalk. Lois. 1975. *Mengerti Sejarah Penerjamah Nugrohonotosusanto*. Jakarta : Univesitas Indoensia
- Hugiono dan Poewantara. 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah* Jakarta : Bina Aksara.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pedekatan Ilmu Sosial dalam Metrodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lawang, Robert MZ. 1985. *Pengatar sosiologi*. Jakarta : Universitas Terbuka Depdikbud.
- Niampe, La & La Ode Syukur. 2009. *Silsilah Bagsawan Buton (Pengantar dan Suntingan Teks)*. Kendari: FKIP Unhalu
- Notosusanto, Nograho . 1987. *Masalah Pengertian Sejarah Kontmupter*: Jakarta Yayasan Idayu.
- Pranoto, Susanto W. 2010. *Teori & Merodologi Sejarah*. Yoyakarta: Graha Ilmu.
- Soemarajan. Selo,at. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : UI Press.
- Tamburaka, Rustam. 1993. “ *Feragmen-Fragmen Teori Filsafat Sejarah, Logika dan Metodologi Penelitian*”. Dikta Unhalu: Kendari
- Yunus, rahim. 1995. *Posisi tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19*. Jakarta: INIS
- Zahari, A.M. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butun*. Jakarta: Depdikbud
- Zuhdi, Susanto. 2010. *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Zuhdi, Susanto, dkk. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Depdikbud.